

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Peneliti memilih KPP Pratama Jakarta Pulogadung karena termasuk dalam wilayah Ibukota Negara yang menjadi pusat pemerintahan serta pusat perekonomian negara sehingga memiliki jumlah Wajib Pajak yang banyak serta pekerjaan yang berbeda beda. Ruang lingkup penelitian ini hanya kepada pengaruh

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *survey* melalui angket (kuesioner) guna mendapatkan data primer, dan untuk mendapatkan data berupa gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah desain pengambilan sampel area (*area sampling design*) dengan mengambil sampel data yang termasuk di wilayah populasi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung.

D. Populasi dan Sampling atau Jenis dan Sumber Data

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh adalah 59.497. Jumlah minimal sampel ditentukan peneliti menggunakan rumus Slovin (Burhan Bugin, (2008) dalam Utami, Ayu, dan Andi (2012)) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Taraf kesalahan atau nilai kritis

Pengambilan sampel dilakukan pada tingkat kepercayaan 90% atau nilai kritis 10% dengan pertimbangan nilai kritis tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu Utami, Ayu, Andi (2012) .

Seperti yang telah diketahui dari sampel penelitian, penelitian ini menggunakan jenis data adalah data primer. Sumber data didapat oleh peneliti dengan mengajukan kuesioner kepada para responden.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh (Novak, 1989) dalam Kiryanto (2000) yaitu :

- a. Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan benar
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya

Diukur menggunakan skala likert 5 poin mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju untuk 4 pernyataan.

2. Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Jadi kesadaran membayar pajak yaitu kesadaran yang dimiliki oleh manusia untuk membayar pajaknya.

Kesadaran membayar pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator empirik dalam Widayati, Nurlis (2010) yaitu :

- a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
- b. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
- c. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
- d. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 4 pernyataan

3. Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Mcleod, George (2008 : 103) pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal ataupun melalui upaya sendiri membaca dan mengamati. Menurut Steven Scott (2007 : 290) pemahaman adalah pengetahuan tentang cara untuk membedakan antara informasi yang benar serta praktis dan yang tidak. Pemahaman menempatkan nilai yang besar pada kebenaran dan penerapan konkret kebenaran. Jadi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan dapat membedakan antara informasi yang benar tentang peraturan pajak.

Variabel ini diukur dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator empirik dalam Widayati, Nurlis (2010) yaitu :

- a. Pendaftaran NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan
- b. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan
- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
- e. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi

f. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 6 pernyataan.

4. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Jadi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah suatu proses penginterpretasian atas kualitas sistem perpajakan.

Variabel ini diukur dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Hardiningsih, Nila (2011) yaitu :

- a. Pelaporan SPT melalui *e-SPT* dan *e-Filling*.
- b. Pelaporan SPT yang melalui *e-Filling* melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak harus memiliki *e-FIN* dan telah memperoleh sertifikat (*digital Certificate*).
- c. Pembayaran pajak melalui *e-Banking*.
- d. Penyampaian SPT melalui *drop box*

- e. Update peraturan pajak secara *online* melalui internet.
- f. Pendaftaran NPWP melalui *e-Register*.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 6 pernyataan.

5. Kualitas Pelayanan

Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan (2005 : 208) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan kualitas menurut Goetsch & Davis, 1994 dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2005 : 209) merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Jadi kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis dimana proses pemenuhan kebutuhan produk, dan jasa sudah memenuhi harapan atau melebihi harapan.

Menurut Caro & Garcia (2007) dalam Monica (2013) indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh :

a. Kualitas interaksi

Dalam kualitas interaksi diukur menggunakan Indikator pelayanan fiskus adalah kuesioner penelitian Lewa (2009) dalam (Fikriningrum, Muchamad 2012) dengan indikatornya yaitu:

1. Fiskus (aparatur pajak) bekerja secara transparan
2. Fiskus sukarela membantu kesulitan Wajib Pajak (bersedia memberikan penyuluhan)

3. Fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan
4. Menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan
5. Fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan Wajib Pajak.

b. Kualitas lingkungan fisik

Kualitas lingkungan fisik diukur menggunakan indikator dari Hardiningsih, Nila (2011) yaitu:

1. Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
2. TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak

c. Hasil kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan diukur menggunakan indikator dari Hardiningsih, Nila (2011) yaitu:

1. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi *Skill, Knowledge, Experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan
2. Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik.
3. Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada Wajib Pajak menjadi semakin nyata.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 12 pernyataan.

6. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2003 : 39-40) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Variabel ini diukur menggunakan indikator Munari (2005) yaitu :

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan.
- d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk 4 pernyataan.

Tabel III.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Teori Definisi	Indikator	Sub Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Safri Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan	1. Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan. 2. Mengisi formulir pajak dengan benar 3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar 4. Membayar	1. Secara umum dapat dikatakan bahwa anda paham dan berusaha memahami UU Perpajakan 2. Anda selalu mengisi formulir pajak dengan benar 3. Anda selalu	Kiryanto 2000

	hak perpajakannya.	pajak tepat pada waktunya	menghitung pajak dengan jumlah yang benar 4. Anda selalu membayar pajak tepat pada waktunya	
Kesadaran Membayar Pajak (X_1)	Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Jadi kesadaran membayar pajak yaitu kesadaran yang dimiliki oleh manusia untuk membayar pajaknya.	1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara 2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara 3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara	1. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar 2. Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara 3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara	Widayati dan Nurlis (2010)
Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Pajak (X_2)	Menurut Mcleod, George (2008 : 103) pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik	1. Pendaftaran NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan 2. Pengetahuan	1. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk	Widayati dan Nurlis (2010)

	itu melalui mata kuliah formal ataupun melalui upaya sendiri membaca dan mengamati. Menurut Steven Scott (2007 : 290) pemahaman adalah pengetahuan tentang cara untuk membedakan antara informasi yang benar serta praktis dan yang tidak. Pemahaman menempatkan nilai yang besar pada kebenaran dan penerapan konkret kebenaran. Jadi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan dapat membedakan antara informasi yang benar tentang peraturan pajak.	dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan 3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan 4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak 5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi 6. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training	memperoleh NPWP 2. Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan 3. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak 4. Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku 5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP 6. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training	
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	Menurut Widayati dan Nurlis (2010) Persepsi dapat dinyatakan	1. Pelaporan SPT melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> 2. Pelaporan SPT yang melalui <i>e-</i>	1. Pelaporan SPT melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Fillings</i> sudah efektif dan	Hardinin gsih, Nila (2011)

(X ₃)	sebagai suatu proses pengorganisasian , penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Jadi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah suatu proses penginterpretasian atas kualitas sistem perpajakan.	<i>Filling</i> melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak harus memiliki <i>e-FIN</i> dan telah memperoleh sertifikat (<i>digital Certificate</i>) 3. Pembayaran pajak melalui <i>e-Banking</i> 4. Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> 5. <i>Update</i> peraturan pajak secara <i>online</i> melalui internet 6. Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Register</i>	baik 2. Syarat Penyedia Jasa Aplikasi <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sudah cukup dan baik yaitu dengan memiliki <i>e-FIN</i> dan telah memperoleh sertifikat (<i>digital Certificate</i>). 3. Pembayaran pajak melalui <i>e-Banking</i> aman, cepat, mudah, dan terpercaya 4. Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> mudah, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 5. <i>Update</i> peraturan pajak secara <i>online</i> melalui internet sudah efektif 6. Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registers</i> sudah efektif, mudah, dan cepat	
Kualitas Pelayanan (X ₄)	Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan (2005 : 208) pelayanan adalah	1. Kualitas interaksi 2. Kualitas lingkungan fisik	1. Fiskus (aparatur pajak) bekerja secara transparan 2. Fiskus (aparatur pajak) bekerja secara cepat	Monica (2013) Fikrinigrum,

	proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan kualitas menurut Goetsch & Davis, 1994 dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2005 : 209) merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Jadi kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis dimana proses pemenuhan kebutuhan produk, dan jasa sudah memenuhi harapan atau melebihi harapan.	3. Hasil kualitas pelayanan	pajak) sukarela membantu kesulitan Wajib Pajak (bersedia memberikan penyuluhan) 3. Fiskus (aparatur pajak) senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan 4. Menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan 5. Fiskus (aparatur pajak) memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan Wajib Pajak 6. Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menambah kenyamanan Wajib Pajak 7. TPT memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak 8. Fiskus memiliki kompetensi Skill,	Muchamad (2012) Hardiningsih, Nila (2011)
--	--	------------------------------------	---	---

			Knowledge, Experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan 9. Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayanan publik 10. Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada Wajib Pajak	
Sanksi Perpajakan (X ₅)	Menurut Mardiasmo (2003 : 39-40) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.	1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib yang melakukan pelanggaran 3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib	1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib yang melakukan pelanggaran 3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib	Munari (2005)

		Pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan	Pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan	
		4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

Sumber : Data diolah oleh penulis

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda, sebelumnya data terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji kualitas data, jika data tersebut sudah valid dan andal maka akan dilanjutkan menguji menggunakan asumsi klasik. Dalam penelitian ini peneliti menguji asumsi klasik dengan *software SPSS*.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.(Ghozali, 2001)

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu

pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.(Ghozali, 2001)

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Variances Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.(Ghozali, 2001)

4. Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan (Ghozali, 2001) adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = KepatuhanWajib Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak

- β_2 = Koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan
- β_3 = Koefisien regresi variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan
- β_4 = Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan
- β_5 = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan
- X_1 = Kesadaran membayar pajak
- X_2 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan
- X_3 = Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan
- X_4 = Kualitas pelayanan
- X_5 = Sanksi perpajakan
- e = *Error*

5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali, 2001)

6. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .(Ghozali, 2001)

7. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.(Ghozali, 2001)